



## Perkembangan Kinerja Keuangan di Kabupaten Trenggalek Dari Tahun 2018-2021 Sebagai Perbandingan Kinerja Sebelum dan Setelah Terjadinya *Pandemic Covid-19* di Kabupaten Trenggalek

### *Development of Financial Performance in Trenggalek Regency from 2018-2021 as a Comparison of Performance Before and After the Covid-19 Pandemic in Trenggalek Regency*

Krissantina Eferyn<sup>1</sup>, Duwi Riningsih<sup>2</sup>, Andy Chandra Pramana<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Kadiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jl. Selomangleng No. 1 Mojoroto Kediri

Email: [krissantina\\_eferyn@unik-kediri.ac.id](mailto:krissantina_eferyn@unik-kediri.ac.id)

#### Article Info

Article history:

Received: 27 Maret 2023

Accepted: 09 Juni 2023

Published: 30 Juni 2023

Keywords: *ratio; effectiveness and efficiency ratio; growth ratio; covid-19*

DOI: [10.37859/jae.v13i1.4773](https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4773)

JEL Classification:

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan di kabupaten trenggalek dari tahun 2018-2021 sebagai perbandingan kinerja sebelum dan setelah terjadinya pandemic covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah Rasio Kemandirian, Rasio efektifitas dan Efisiensi, serta Rasio Perkembangan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pada rasio kemandirian keuangan Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuatif. Sempat terjadi kenaikan kemandirian pada tahun 2019 namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan efektifitas dan kembali naik pada tahun 2021 namun kinerja keuangan kabupaten trenggalek tahun 2018-2020 termasuk dalam kategori efektif dan sangat efektif. Untuk rasio efisiensi, paling bagus terjadi pada tahun 2019. Pandemic covid membuat adanya penurunan kinerja pada rasio efisiensi. Kinerja Kembali mengalami perbaikan pada rasio efisiensi pada tahun 2021.

*The purpose of this study is to determine the development of financial performance in Trenggalek District from 2018-2021 as a comparison of performance before and after the Covid-19 pandemic. This type of research is quantitative descriptive research. The variables used in this study include the Independence Ratio, the Effectiveness and Efficiency Ratio, and the Growth Ratio. The results obtained in this study are that the ratio of financial independence has fluctuated. There was an introduction of independence in 2019 but then it decreased in 2020. In 2019 and 2020 there was a decrease in effectiveness and it rose again in 2021 but the financial performance of Trenggalek district in 2018-2020 was included in the effective and very effective category. For efficiency ratios, the best occurred in 2019. The Covid pandemic caused a decrease in efficiency ratio performance. Performance has again experienced an improvement in the efficiency ratio in 2021.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu indikator dalam terwujudnya pembangunan nasional. Untuk itu pembangunan daerah merupakan bagian terintegral dalam pembangunan nasional. Sejak bergulirnya otonomi daerah sejak tahun 2001 silam, mengubah pembangunan nasional yang bersifat sentralisasi menuju arah desentralisasi. Perubahan ini cukup fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pemerintah Indonesia. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan terutama dalam pengelolaan sumberdaya yang ada di daerahnya dan dapat disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan juga kepentingan daerah tersebut dalam melakukan pembangunan. Disamping itu pemerintah daerah juga dapat mengelola sumberdaya yang dimiliki secara leluasa dan mempertanggung jawabkan kepada masyarakat secara langsung. Otonomi daerah merupakan hak daerah otonom dalam mengurus dan mengatur daerahnya sendiri baik dalam pemerintahan maupun dalam mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah.

Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa latin yaitu *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* artinya aturan. Sehingga dapat diartikan bahwa otonom adalah pengaturan sendiri atau dapat dikatakan pemerintah melakukan pengaturan atau pemerintahan sendiri. Tujuan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Tentunya hal ini dilakukan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan, serta terbentuknya sarana dan prasarana daerah yang memadai dan layak. Selain itu dengan adanya otonomi daerah ini dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien serta dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan akan mampu meningkatkan daya saing daerah serta kesejahteraan dapat terwujud.

Sistem desentralisasi yang transparan merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang baik, selain itu efektif dan efisiensi serta proses pengambilan kebijakan yang akuntabel menjadi syarat utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang akuntabel adalah dengan melihat perkembangan dalam pelaporan keuangan daerah. Pelaporan keuangan ini nantinya dapat digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat serta dapat juga digunakan dalam menilai kinerja serta dapat juga digunakan menentukan suatu daerah patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

Kinerja Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai bentuk kemampuan daerah dalam mengelola serta mendapatkan sumber sumber keuangan yang berasal dari dalam daerah untuk memenuhi seluruh kegiatan dalam pemerintahan dan pembangunan daerah, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan tidak tergantung terhadap pemerintah pusat atau daerah lainnya. Laporan keuangan daerah menjadi alat ukur dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut (Mardiasmo, 2018) bahwa pengukuran kinerja keuangan merupakan bagian dari sistem yang bertujuan dalam membantu manajer dalam hal ini pemerintah dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan dari segi finansial maupun non finansial.

Penilaian terhadap pemerintah daerah dapat dilakukan dengan pengukuran kinerja keuangan daerah tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk membandingkan rencana kerja yang disusun dengan pelaksanaan dan realisasinya. Disamping itu ini juga dapat dijadikan indikator meningkatnya kinerja pemerintah dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya atau tahun mendatang. Salah satu alat yang digunakan dalam penilaian kinerja adalah menggunakan analisis rasio keuangan daerah antara lain, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio kemandirian, rasio aktivitas, rasio debt service coverage, serta dengan rasio tingkat pertumbuhan (Halim, 2004). Pentingnya analisis kinerja keuangan ini dapat dijadikan pedoman dan panduan dalam

menjalankan pemerintahan tahun depan agar hasil yang dicapai dapat lebih baik lagi. Disamping itu, analisis ini mampu memberikan acuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menetapkan, memantau serta juga dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena Hal tersebut menjadi syarat utama pemerintah dalam mencapai tujuan dan cita-cita dalam berbangsa dan bernegara.

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Trenggalek adalah 1.261,40 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah Sedangkan sisanya (1/3 bagian) merupakan tanah dataran rendah.

Salah satu daerah yang menjalankan sistem otonomi daerah adalah kabupaten Trenggalek. Dari hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2010-2014 kinerja keuangan kabupaten trenggalek cukup baik. Terjadi peningkatan pendapatan setiap tahunnya hingga mencapai 24,17% pada tahun 2014. Disamping itu penerimaan pendapatan daerah setiap tahunnya hampir mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari rasio efektivitas PAD tahun 2010 sampai tahun 2014 cenderung cukup efektif.

Namun di akhir tahun 2019 dan sepanjang tahun 2020 dan 2021 masyarakat dunia menghadapi pandemi global yaitu Covid-19. Pandemi ini berdampak pula terhadap Indonesia kemunculan pandemi covid-19 ini membuat pembatasan aktivitas masyarakat diluar rumah. Jika di negara lain menerapkan kebijakan Lockdown yang artinya menutup segala kegiatan diluar ruangan dan menutup akses masuk maupun keluar daerah yang terdampak pandemi. Di Indonesia sendiri mengambil kebijakan dengan adanya pembatasan sosial masyarakat atau disebut social distancing dan juga adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi dampak krisis ekonomi akibat Pandemi (D. A. D. Nasution, E. Erlina, 2020). Meskipun begitu kegiatan ini juga cukup berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Karena ruang gerak masyarakat yang dibatasi dan belum lagi dengan adanya perumahan karyawan dan bahkan banyak karyawan yang harus diberhentikan dari pekerjaannya karena perusahaan menghindari kerugian akibat tidak mampu dalam menutup biaya operasional perusahaan (Hanoatubun, 2020). Kondisi ini membuat perekonomian di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 lalu perekonomian mengalami deflasi dengan pertumbuhan sebesar -2,07 persen. hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami deflasi atau penurunan drastis. hal serupa juga terjadi di provinsi Jawa Timur bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur berkontraksi sebesar 3,41 persen.

Keadaan ini juga tidak terjadi di Kabupaten Trenggalek. Kegiatan pembatasan ini juga berimplikasi terhadap anggaran dan belanja daerah, baik dari segi belanja pemerintah, emiayaan, maupun dalam pendapatan daerahnya. Untuk itu, pengelolaan anggaran daerah harus pula diikuti dengan prinsip kehati-hatian, agar pandemi dan pembatasan sosial ini tidak mengganggu jalanya pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan APBD merupakan unsur utama pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakannya. Dalam menjalankan kebijakan, APBD memerankan peranan vital dalam mengembangkan daerah yang efisien dan efektif terutama dalam pemerintahan di Kabupaten Trenggalek. APBD merupakan kerangka acuan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Ini digunakan dalam menentukan besarnya pendapatan maupun pengeluaran daerah setiap tahunnya. Disamping itu APBD juga digunakan dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pembangunan daerahnya, disamping itu juga digunakan sebagai otoritas pengeluaran masa mendatang dan juga merupakan instrumen standar dalam evaluasi dan alat koordinasi bagi semua stakeholder yang berkepentingan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nadila et.al, 2022) menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penurunan kinerja keuangan pemerintah Kota Palopo di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya namun pengaruh/dampaknya tidak signifikan. Hasil berbeda didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Indah, 2022) adanya perbedaan sebelum dan sesudah covid-19 dalam rasio derajat desentralisasi sedangkan rasio lainnya cenderung tidak ada perbedaan yang signifikan. Hasil serupa juga didapat oleh (Ardhana Rheswari dan Syaiful Akbar, 2022) di kabupaten Gresik menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan selama sebelum dan sesudah terjadinya pandemi covid-19. pada penelitian tersebut hanya derajat desentralisasi yang memiliki perbedaan signifikan.

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perkembangan kinerja keuangan di kabupaten trenggalek dari tahun 2018-2021 sebagai perbandingan kinerja sebelum dan setelah terjadinya pandemic covid-19 di Kabupaten Trenggalek.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana data-data yang digunakan dalam bentuk angka. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Efisiensi, serta Rasio Pertumbuhan. Variabel yang pertama digunakan adalah Rasio kemandirian. Rasio ini digunakan dalam melihat apakah daerah telah mandiri dan mampu membiayai seluruh kegiatannya dari pendapatan yang bersumber dari internal daerah tersebut dibandingkan dengan sumber keuangan dari ekstern daerah seperti pemerintah pusat, Provinsi dan dari daerah lain.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Utang}}$$

Disamping Rasio kemandirian, Variabel selanjutnya adalah rasio Efektifitas dan Efisiensi. Rasio ini efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan dan mendapatkan PAD dari target yang ditetapkan. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Sedangkan rasio efisiensi menggambarkan perbandingan biaya yang digunakan dengan hasil yang didapat dalam penerimaan PAD. Untuk mengukurnya dapat dilihat pada rumus berikut ini:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Variabel terakhir yaitu Rasio Pertumbuhan menggambarkan kemampuan daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya dibandingkan tahun sebelumnya. Pengukuran variabel ini dapat dilihat dalam rumus berikut ini:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_{t1} - P_{t0}}{P_{t0}}$$

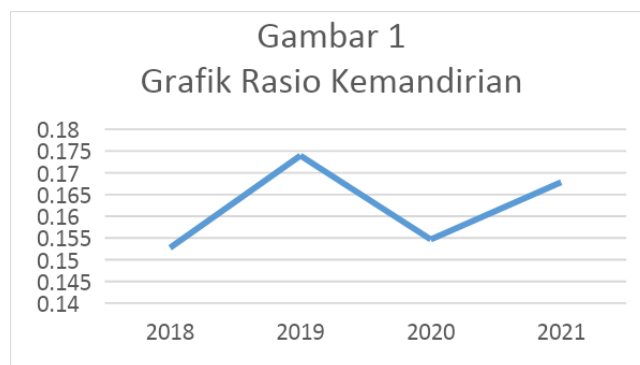
Data yang diambil dari penelitian ini adalah data realisasi anggaran Kabupaten trenggalek pada tahun 2018-2021. Hasil perhitungan masing-masing indikator kemudian dianalisis dengan metode deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasio Kemandirian

Salah satu indikator untuk melihat kinerja keuangan suatu dera adalah dengan melihat rasio kemandirian. Rasio ini akan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan yang bersumber dari dalam daerahnya sendiri dan mampu membiayai kegiatan pelayanan, pemerintahan, dan juga pembangunan di wilayahnya. Rasio ketergantungan ini akan memberikan gambaran daerah terhadap ketergantungan sumber dana dari luar daerah atau berasal dari pihak ekstern. Semakin tinggi rasio yang kemandirian menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal rendah. Begitu pula sebaliknya jika rasio kemandirian semakin rendah maka ketergantungan daerah tersebut kepada pihak eksternal semakin tinggi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di kabupaten Trenggalek yang dilakukan dari tahun 2018-2021 mengalami angka yang fluktuatif. Rasio kemandirian tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana kemandirian sebesar 17,39%. Jika melihat kriteria yang disampaikan oleh Halim , 2002 dalam Kusuma (2014), tingkat kemandirian keuangan Kabupaten trenggalek Rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

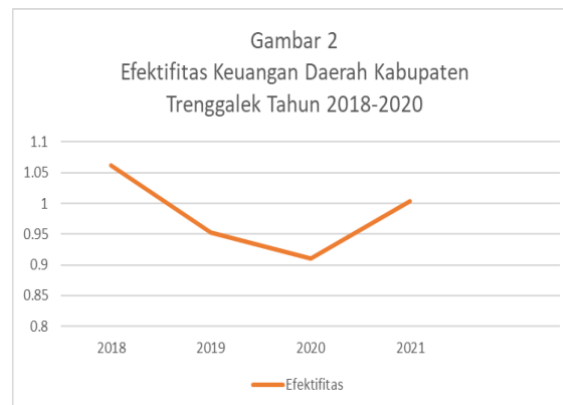


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuatif. Sempat terjadi kenaikan kemandirian pada tahun 2019 namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020. Turunnya rasio kemandirian ini dapat terjadi karena adanya factor pandemic yang berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi dan berdampak pula pada pendapatan daerah. Dampak Covid-19 pada keuangan pemerintah daerah telah, dan akan terus, signifikan pada sisi pengeluaran dan pendapatan, yang mengakibatkan defisit dan peningkatan beban utang. terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan asli daerah pemerintah provinsi sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama Covid-19 di Indonesia (Farouq Ishak et al., 2021). Pendapat sama juga disampaikan oleh (Syamsul et al., 2022). Kemudian pada tahun 2021 terdapat kenaikan dalam perolehan pendapatan daerah. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021, pembahasan ketat yang dilakukan pada tahun 2020 mengalami kelonggaran.

### Rasio Efektivitas Dan Efisiensi

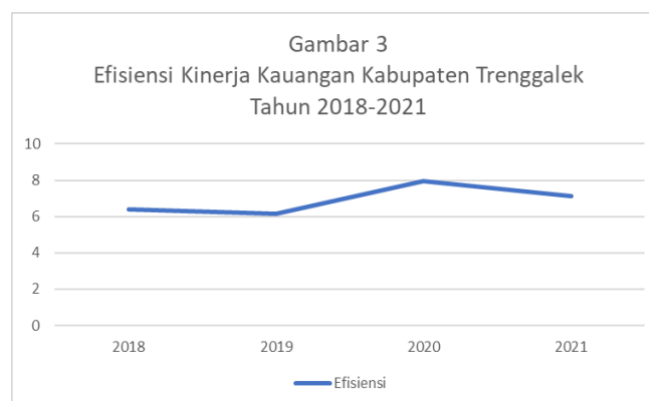
Rasio Efektivitas merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam menilai kinerja yang dilakukan oleh organisasi atau pemerintah efektif atau tidak. Dikatakan efektif jika pemerintah mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dengan baik. Menurut (Kusufi, 2014) bahwa efektivitas dapat dicapai jika hasil akhir dari suatu pelayanan yang diberikan organisasi

atau pemerintah yang berkaitan dengan hasil outputnya. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Jika hasil yang didapat memiliki kontribusi yang besar dalam pencapaian tujuan, maka dapat dikatakan telah efektif. Dengan kata lain semakin tinggi kontribusi realisasi hasil terhadap tujuan, maka semakin efektif pelaksanaan pemerintahan. (Kusuma, 2005). Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Kusufi, 2014). Berdasarkan hasil yang penelitian menunjukkan bahwa efektivitas keuangan berada di angka lebih dari 90%. Efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2020. Seperti tampak pada grafik dibawah ini:



Dari grafik diatas dapat diketahui perkembangan efektifitas dalam kinerja keuangan Kabupaten Trenggalek. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan efektifitas dan Kembali naik pada tahun 2021. Namun meskipun demikian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994, bahwa kinerja keuangan kabupaten trenggalek tahun 2018-2020 termasuk dalam kategori efektif dan sangat efektif. Efektif untuk tahun 2019 dan 2020 sedangkan tahun 2018 dan 2021 memiliki kriteria sangat efektif.

Berbeda dengan tingkat efisiensi keuangan daerah dalam memperoleh PAD, menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2021, Rasio efektifitas berada di angka 60-80% dengan kriteria cukup efektif. Seperti yang tergambar pada grafik dibawah ini.

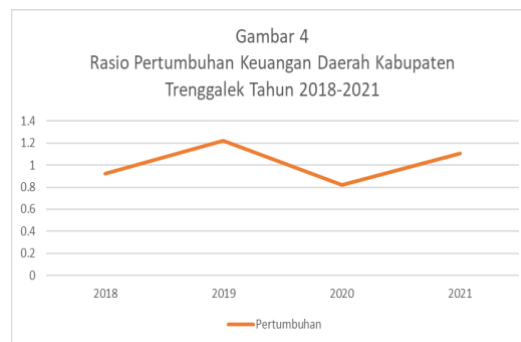


Dari data diatas dapat dilihat pergerakan rasio efisiensi yang ada di kabupaten Trenggalek. Rasio paling bagus terjadi pada tahun 2019. Pandemic covid membuat adanya penurunan kinerja pada rasio efisiensi. Kinerja Kembali mengalami perbaikan pada rasio efisiensi pada tahun 2021. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Vebiani et al., 2022) yang

dilakukan pada pemerintah provinsi Jawa Barat dengan hasil bahwa kinerja keuangan dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi mengalami penurunan.

### Rasio Pertumbuhan

Besarnya kemampuan daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan kemampuannya dalam mencapai hasil dibandingkan dengan periode sebelum dan setelahnya disebut dengan Rasio Pertumbuhan (growth Rasio). Ini dapat dijadikan alat evaluasi pada masing-masing komponen yang digunakan dalam memperoleh pendapatan serta untuk mengevaluasi komponen yang perlu ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik pada tahun berikutnya. (Kusufi, 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan rasio pertumbuhan di Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa pertumbuhan terendah dari tahun 2018-2021 terjadi pada tahun 2020. Seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini:



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tren kenaikan rasio pertumbuhan terjadi pada tahun 2018-2019 pertumbuhan terjadi cukup tinggi yaitu 21,95%. Pada tahun 2020 saat terjadi pandemic dan adanya pemberlakuan Pembatasan social terjadi minus Rasio pertumbuhan yaitu -18%. Adanya pandemic covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adanya pembatasan aktivitas masyarakat membuat kegiatan ekonomi juga berjalan lebih lambat. Hal ini berpengaruh terhadap Penerimaan PAD. (Farouq Ishak et al., 2021) berpendapat bahwa Dampak Covid-19 pada keuangan pemerintah daerah telah, dan akan terus, signifikan pada sisi pengeluaran dan pendapatan, yang mengakibatkan defisit dan peningkatan beban utang. Disamping itu penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amal & Wibowo, 2022) yang menunjukkan bahwa Adapun rasio aktivitas dan pertumbuhan cenderung mengalami penurunan kinerja selama periode pandemi Covid-19.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada rasio kemandirian keuangan Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuatif. Sempat terjadi kenaikan kemandirian pada tahun 2019 namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan efektivitas dan Kembali naik pada tahun 2021 namun kinerja keuangan kabupaten trenggalek tahun 2018-2020 termasuk dalam kategori efektif dan sangat efektif. Untuk rasio efisiensi, paling bagus terjadi pada tahun 2019. Pandemi covid membuat adanya penurunan kinerja pada rasio efisiensi. Kinerja Kembali mengalami perbaikan pada rasio efisiensi pada tahun 2021. Dan pada rasio Pertumbuhan, tren kenaikan rasio 21,95%. Pada tahun 2020 saat terjadi pandemic dan adanya pemberlakuan Pembatasan social terjadi minus Rasio pertumbuhan yaitu -18%.

### SARAN

Penelitian ini terbatas pada pengukuran dengan 3 variabel utama dalam melihat kinerja keuangan daerah Kabupaten trenggalek. Untuk penelitian selanjutnya dapat pula memasukkan

indikator dan variabel lain untuk melihat lebih dalam mengenai inerja keuangan daerah pada saat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723>
- Ardhana Rheswar Pingkan, Syaiful Akbar Fajar. 2022. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Vol 4 No 6 (2022) 1897-1913P-ISSN 2656-2871E-ISSN 2656-4351DOI: 10.47467/alkharaj.v4i6.1442
- D. A. D. Nasution, E. Erlina, and I. M. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5.
- Farouq Ishak, J., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2021). Covid-19: Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Covid-19: Its Impact on Local Own-Source Revenue. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 587–591.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. UPP AMP YKPN.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2, 146–153.
- Indah Lestari Yulia. 2022. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Dan 2021 (Pra Pandemi Dan Pasca Pandemi). Skripsi.Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wijaya Putra Surabaya
- Kusufi, A. H. dan M. S. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*. Salemba Empat.
- Kusuma, B. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT Gramedia Pusataka Utama.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit. Andi.
- Nadila et.al. 2022. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo. [http://repository.umpalopo.ac.id/2801/1/Jurnal%20Artikel\\_201830044.pdf](http://repository.umpalopo.ac.id/2801/1/Jurnal%20Artikel_201830044.pdf)
- Syamsul, Nurlailah, & Nurhadi. (2022). Krisis Pandemi Covid-19 Dampaknya Pada Pendapatan Daerah. *Keunis*, 10(2), 1–10. <https://doi.org/10.32497/keunis.10i2.3293>
- Vebiani, D., Nugraha, N., & Hardiana, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). *Fineteach: Journal of Finance ...*, 1(1), 113–126. <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach/article/view/48137%0Ahttps://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach/article/download/48137/19563>